

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan didefinisikan sebagai faktor yang memainkan peranan signifikan dalam membangun karakter bangsa, dengan menjalani pendidikan formal, informal, dan nonformal. Kualitas SDM pada suatu negara akan menentukan maju atau tidaknya. Pendidikan menjadi salah satu solusi efektif untuk mencerdaskan suatu bangsa. Pendidikan berupaya untuk melaksanakan pengembangan terhadap potensi dan juga prospek yang ada pada tiap individu supaya potensi dan juga prospek tersebut bisa berguna untuk Negara dan juga bangsa tersebut. (Djabidi, 2016). Namun pendidikan di Indonesia masih dianggap belum mampu mencetak SDM yang bisa mengikuti perkembangan zaman dikarenakan kualitas pendidikan Indonesia sendiri masih dianggap kurang (masih perlu banyak perbaikan untuk mengikuti negara maju).

Pendidikan diselenggarakan dengan integratif, yaitu dengan memadukan aktivitas pendidikan yang dilaksanakan guru dan juga kepala sekolah karena keduanya memiliki peran yang sangat besar di sekolah. Namun, dunia pendidikan tidak hanya membahas seputar kegiatan pembelajaran yang dilakukan antara guru dan murid. Di dalamnya terdapat komponen-komponen yang harus diperhatikan agar proses pembelajaran tersebut dapat dikatakan ideal. Guru tidak hanya sekedar membagi ilmu ke peserta didik. Guru harus menguasai berbagai metode supaya pembelajaran bisa sampai dengan baik ke peserta didik. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas kegiatan belajar mengajar. peserta didik tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan belajar dari awal hingga akhir, namun juga memahami

apa yang disampaikan oleh guru. Guru mempunyai tugas “membagi nilai” tidak hanya “membagi ilmu” yang bekerja sebagai seorang pendidik dan juga melakukan bimbingan kepada peserta didik yang terarah. Tugas lain seorang guru dalam mengembangkan peserta didik antara lain mengajarkan nilai-nilai kehidupan, mengajarkan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedudukan dan peran guru dalam menghadapi era globalisasi dianggap semakin bermakna dan strategis dalam mempersiapkan dan menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan juga mutu.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam UU No. 20 Tahun 2013 pasal 18 ayat 3 adalah jenjang pendidikan formal lanjutan dari SMP/MTs yang mengadakan pendidikan kejuruan di jenjang Pendidikan menengah. Pembelajaran di sekolah kejuruan ditujukan untuk mencetak generasi yang siap turun di lapangan kerja. Pemberdayaan tenaga siswa SMK sudah dimulai sebelum siswa lulus sekolah melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL). Pemerintah sangat memperhatikan keberadaan SMK ini karena menurut pemerintah negara kita perlu meningkatkan daya saing untuk menghadapi tantangan globalisasi yang semakin kuat. Pendidikan ini dianggap sebagai solusi yang relevan dalam mengatasi masalah lapangan pekerjaan sekaligus bidang industry pekerjaan. Maka dari itu, pemerintah fokus memperbaiki kualitas siswa SMK karena dalam pembelajaran SMK sudah dipersiapkan untuk menghadapi dunia kerja.

Berdasarkan pernyataan Siswanto (Guru Vokasi Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMKN Kendal dan Ketum PP Ikatan Guru Vokasi Indonesia) (dalam situs guruberbagi.kemdikbud.go.id), Pendidikan vokasi menjadi yang utama dalam memberikan hasil ciptaan sumber daya manusia yang kompeten, siap kerja, dan mempunyai daya saing yang tinggi untuk bekerja secara professional. Presiden

Joko Widodo pada Rapat Kabint Paripurna 2017 mengarahkan untuk revitalisasi Pendidikan vokasi dengan pembukaan akses luas bagi masyarakat agar mendapatkan keterampilan dan mengubah kurikulum yang sudah ada menjadi kurikulum berbasis industri. Selain itu juga menyiapkan SDM professional di bidangnya. Diharapkan semua Lembaga penyelenggara Pendidikan vokasi mendapat dukungan dan prioritas dalam mengembangkan kualitas SDMnya sehingga ada hasil lulusan yang bermutu. Ada enam isu yang sangat penting dan masih relevan untuk dibahas terkait Pendidikan vokasi. Pertama, Peningkatan untuk Kompetensi Guru. Harapannya, tidak akan ada lagi SMK yang mencetak pengangguran. Tak ada lagi SMK penyumbang sekaligus pencetak pengangguran. Harus ada perluasan akses Pendidikan vokasi sehingga adanya kesempatan besar bagi warga untuk mendapatkan aksesnya. Kedua, *upgrade* fasilitas dan sarana prasarana untuk menunjang laboratorium dan bengkel. Pelaksanaan Pendidikan vokasi diselenggarakan oleh Politeknik, SMK, dan Universitas yang memiliki program vokasi. Pendidikan vokasi dapat dilakukan dari jenjang D-1 sampai Doktor Terapan. Ketiga, Kurikulum aplikatif dan implementatif dengan IDUKA. Untuk itu kurikulum implementatif di SMK dirancang dan dikembangkan secara berassama-sama. Keempat, *mira* dan kerja sama dengan industry sangatlah penting. Di sisi lain, industri membutuhkan sumber daya manusia yang “siap kerja”, artinya SDM tersebut dapat mengoperasikan program dan mesin yang ada di perusahaan tempat bekerja. SDM yang lulus dari SMK dinilai lebih “siap” dalam proses adaptasi (masa percobaan) lebih singkat, dikarenakan lulusan vokasi lebih cepat dalam memahami dan melakukan pekerjaan yang dibutuhkan industri. Industri membutuhkan tingkat kompetensi dari teknis hingga manajerial. Kelima, uji kompetensi mahasiswa melalui LSP-P1, sebagai tolak ukur industri. Sebagai

Lulusan Pendidikan Vokasi dengan pendekatan terapan dan berdasarkan kebutuhan industri. Uji kompetensi dilaksanakan sesuai dengan skema SKKNI / KKNI yang telah mendapat izin dari Badan Sertifikasi Profesi Nasional (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi P-1. Enam, Program magang Guru di IDUKA. Persyaratan minimal bagi guru untuk meningkatkan kompetensi tidak cukup dengan satu atau dua hari pelatihan dan pelatihan, tetapi guru perlu merasakan langsung apa yang terjadi di IDUKA yang dinamis dan berubah sangat cepat. Proses yang terjadi dirasakan. Bermutunya lulusan agar terwujud apabila sekolah memiliki guru yang bermutu sehingga Pendidikan vokasi dapat terselenggara sesuai standar yang baik. Prosesnya dimulai dari input (penerimaan siswa baru), proses belajar, sampai dengan lulus (output).

Sekolah Menengah Kejuruan didorong untuk melakukan terobosan-terobosan yang efektif dan berbasis kompetensi keahlian. Harapan “membangun guru pendidikan vokasi agar lebih profesional untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya”, membuat semangat para guru vokasi untuk membangun tata kelola yang baik, transparan, akuntabel dan menciptakan kemandirian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas di setiap produknya. diproduksi dan dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara. SDM di Indonesia harus dibentuk selain hard skill serta karakter yang baik (soft skill), tutur kata yang santun, perilaku yang mencerminkan budaya ketimuran, religius dan profesional.

Untuk mewujudkan pendidikan kejuruan sesuai dengan harapan pemerintah, isi kurikulum pendidikan kejuruan harus disesuaikan dengan tujuan diselenggarakannya pendidikan kejuruan. Guru sebagai pengajar dan pembimbing langsung siswa harus memiliki keterampilan mengajar untuk membentuk siswa menjadi siswa yang siap di lapangan kerja. Meskipun tidak semua mata pelajaran

memuat materi dan mengajarkan langsung untuk siswa siap kerja, namun ada mata pelajaran kejuruan yang dapat dimaksimalkan oleh guru tersebut.

Pada kenyataan yang terjadi di lapangan, ternyata ada beberapa sekolah yang pelaksanaan supervisinya belum berjalan dengan baik. Supervisi akademik yang dilaksanakan seolah-olah hanya bersifat formalitas. Berdasarkan hasil observasi prapenelitian, di beberapa SMP di Jakarta Barat khususnya di SMK Negeri kondisinya juga sama, banyak sekali sekolah yang belum melaksanakan supervisi klinis dengan optimal. Supervisi yang dilaksanakan masih cenderung bersifat administratif saja (pengawasan dilakukan tidak detail). Bahkan ketika supervisi berlangsung, supervisor tidak memaparkan kesalahan-kesalahan di pembelajaran.

Berdasarkan hasil temuan di media, terdapat data guru yang masih mempunyai kompetensi yang belum maksimal. Ketidak-maksimalan tersebut dapat ditinjau berdasarkan pada hasil dari nilai terhadap Uji Kompetensi Guru (UKG) yang terdapat di situs <https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=ukg>, hasil tersebut guru SMK di wilayah Jakarta yang mempunyai nilai UKG khususnya di bidang Pedagogik mempunyai nilai rata-rata yang masih cenderung rendah yaitu 56.49. Dikutip dari nasinal.tempo.co, kepala PPPTK Bandung, Anita mengatakan “standar nilai kompetensi guru pada hasil yang UKG adalah 75.” Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kompetensi guru di Jakarta Barat masih dikatakan kurang jika dilihat dari nilai UKG.

Guru sebagai pelaksana pendidikan harus mempunyai kemampuan (kompetensi) demi terselenggaranya pendidikan yang semakin baik. Kompetensi tersebut berupa pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan lainnya. Terdapat empat yang harus ada pada guru, diantaranya ialah kompetensi professional,

kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan juga kompetensi pedagogik. Berdasarkan keempat jenis dari kompetensi itu, yang menjadi kompetensi utama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini mencakup pengetahuan dan pemahaman guru terkait proses pembelajaran. Dalam kompetensi ini, penguasaan yang harus dimiliki adalah tidak hanya ilmu pengetahuan tetapi harus dapat melaksanakan pengelolaan kelas secara bagus. Kualitas Pendidikan Indonesia bisa diperbaiki salah satunya dengan meningkatkan kualitas guru-gurunya.

Guru sebagai sebuah profesi harus memiliki kompetensi khusus terutama kompetensi mengajar. dalam mengembangkan kompetensinya guru tidak seorang diri melakukan upaya tersebut. Kepala sekolah mempunyai peranan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi demi terwujudnya pencapaian kompetensi sang guru. Kegiatan tersebut dinamakan supervisi.

Supervisi sendiri mengandung makna kegiatan yang di dalamnya terdapat pengawasan, pembinaan, dan juga penilaian serta evaluasi. Di perusahaan manapun kegiatan ini pasti ada yang bertujuan untuk berkembangnya kualitas suatu perusahaan. Dalam dunia pendidikan, klasifikasi dari supervisi adalah supervisi pendidikan. Dalam supervisi pendidikan, yang terlibat adalah para pemangku pendidikan seperti pengawas sekolah, kepala sekolah serta guru. Ketiga pelaku supervisi pendidikan tersebut mempunyai peran tersendiri. Dalam supervisi pendidikan, terdapat salah satu jenisnya yang dinamakan supervisi klinis. Supervisi klinis ini menekankan adanya pembinaan khusus antara kepala sekolah dengan guru. Pembinaan yang dilaksanakan adalah mengenai aktivitas belajar mengajar yang mana pihak kepala sekolah memantau bagaimana guru menguasai kompetensi mengajar guru baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Supaya kompetensi pedagogik guru terasah dengan baik, maka pelaksanaan supervisi klinis pun harus terlaksana dengan baik pula. Karena disana akan terdapat pembahasan mengenai cara mengajar guru di kelas dan juga bagaimana guru menguasai kelas selama pembelajaran. Kepala sekolah fokus menilai kesiapan mengajar guru mulai dari rancangan pembelajaran, perangkat pembelajaran, sistem penilaian, dan sebagainya. Setelah itu kepala sekolah melakukan evaluasi secara mendalam atas apa yang telah kepala sekolah lihat selama supervisi berlangsung.

Kepala sekolah sebagai supervisor harus optimal dalam pelaksanaan supervisi klinis. Disamping keberadaan (kehadiran) di sekolah, kepala sekolah disamping melaksanakan tugasnya, harus rutin memperhatikan bagaimana perkembangan guru di sekolah. Jika ingin menilai guru secara mendalam, berarti kepala sekolah harus jeli dalam memantau perilaku guru di sekolah serta ada hubungan personal yang dibangun kepada guru. Adanya arahan dan juga bimbingan yang diberikan oleh pihak kepala sekolah akan menambah motivasi untuk para guru agar menjalankan tugasnya dengan baik dari kepala sekolah. Guru bukan hanya termotivasi tapi juga akan bertambah rasa percaya dirinya sehingga guru yakin bahwa dirinya akan lebih baik lagi. Seperti yang diutarakan oleh Feist (2010) bahwa keyakinan atas kemampuan pada seseorang dapat dipengaruhi salah satunya dengan persuasi sosial. Adanya dorongan berupa nasihat, dan saran akan mempengaruhi seseorang untuk lebih yakin atas kemampuan dirinya. Artinya, guru memerlukan arahan dari kepala sekolah agar guru tersebut mempunyai keyakinan yang mana akan terdapat kepercayaan diri atas kemampuan dirinya sebagai pendidik. Hal ini dapat dilakukan pada pelaksanaan supervisi klinis yang mana dalam teorinya Sagala (2017) dalam pelaksanaan supervisi klinis terdapat layanan

dukungan yang diberikan kepada guru sehingga guru dapat meningkatkan kemampuannya,

Guru sebagai sebuah profesi harus memiliki keterampilan khusus yaitu keterampilan mengajar. Keterampilan sama halnya dengan kompetensi dimana itu adalah sebuah kemampuan dalam melakukan sebuah pekerjaan yang didasari oleh ilmu. Kompetensi pedagogik merupakan salah satu kemampuan yang terdapat pada guru. kompetensi ini tidak hanya berbicara soal kemampuan guru memberikan ilmu kepada peserta didik, tapi juga guru harus mempunyai kemampuan untuk memahami keadaan peserta didik.

Supervisi klinis didefinisikan sebagai sebuah proses atau aktivitas yang memungkinkan pihak guru dalam meminimalisir ketidak-sesuaian, dan juga kesulitan yang dialami oleh guru serta merta mengajar yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Sebelum guru memulai *action*-nya sebagai pengajar dan pendidik, guru harus yakin dengan kemampuan yang dimiliki dan kesadaran untuk menilai dirinya sendiri. Tujuannya adalah supaya ada perkembangan dari kemampuannya sebagai guru. Ketika guru sudah mengetahui kendala dan kesalahan apa yang terjadi pada saat mengajar, pada saat itu pula guru sudah mengetahui tindakan apa yang harus diambil. Kegiatan ini dinamakan efikasi diri (penilaian diri). Disini guru merefleksi dan mengevaluasi kemampuan mengajar mereka.

Berdasarkan paparan latar masalah di atas, ada fokus kajian yang dapat diteliti yaitu pelaksanaan supervisi di beberapa SMK Negeri di Jakarta Barat dan bagaimana guru dalam menilai dirinya sehingga berpengaruh terhadap kompetensi yang dimiliki oleh guru.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu uraian latar belakang permasalahan yang disajikan tersebut, ada berbagai permasalahan yang bisa dilaksanakan penelitian dan pengidentifikasian yang berkenaan dengan masih belum kompetennya kemampuan (kompetensi) pedagogik guru di SMK Negeri Wilayah Jakarta Barat. Hal ini ditandai dengan melihat hasil Ujian Kompetensi Guru yang masih relatif rendah. Kemampuan (kompetensi) pedagogik seorang guru dapat dipengaruhi dari pelaksanaan supervisi klinis dan efikasi yang terdapat pada diri guru tersebut. Maka dari itu, dapat diteliti bagaimana pengaruh dari supervisi klinis dan efikasi diri terhadap kompetensi pedagogik guru.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan hanya pada satu variabel eksogen yaitu supervisi klinis, variabel endogen perantara efikasi diri dan variabel endogen akhir adalah kompetensi pedagogik.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah terdapat pengaruh yang dihasilkan oleh supervisi klinis pada efikasi diri guru?
2. Apakah terdapat pengaruh yang dihasilkan oleh pengaruh supervisi klinis pada kompetensi pedagogik guru?
3. Apakah terdapat pengaruh yang dihasilkan oleh pengaruh efikasi diri guru pada kompetensi pedagogik guru?

E. Kegunaan Penelitian

1. Agar memahami pengaruh yang dihasilkan oleh variabel supervisi klinis pada kompetensi pedagogik guru.

2. Agar memahami pengaruh yang dihasilkan oleh variabel efikasi diri guru pada kompetensi pedagogik guru.
3. Agar memahami pengaruh yang dihasilkan oleh variabel supervisi klinis pada efikasi diri guru.

F. Kebaruan Penelitian

1. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Kompetensi Pedagogik yang dimiliki guru (PNS) yang berada di wilayah Jakarta Barat.
2. Peneliti menguji variabel endogen Kompetensi Pedagogik dengan variabel eksogen Supervisi Klinis dan Efikasi Diri yang mana belum pernah ditemukan penelitian pada ketiga variabel tersebut.



